



Paradigma Pendidikan Nasional Abad XXI



Book Review
Mewujudkan Keberagaman
yang Operasional

Penyelenggaraan
Ujian Nasional 2013

Berita BSNP:
Mahkamah Konstitusi Batalkan RSBI

Penanggungjawab
Mohammad Aman Wirakartakusumah

Pemimpin Redaksi
Edy Tri Baskoro

Redaksi Eksekutif
Richardus Eko Indrajit
Djemari Mardapi
Teuku Ramli Zakaria
Weinata Sairin

Redaksi Pelaksana
Bambang Suryadi

Penyunting/Editor
Mungin Eddy Wibowo
Zaki Baridwan
Djaali
Furqon
Jamaris Jamna

Desain Grafis & Fotografer
Arief Rifai Dwiyanto
Djuandi
Ibar Warsita

Sekretaris Redaksi
Ning Karningsih

Alamat:
**BADAN STANDAR NASIONAL
PENDIDIKAN**

Gedung D Lantai 2,
Mandikdasmen
Jl. RS. Fatmawati, Cipete
Jakarta Selatan
Telp. (021) 7668590
Fax. (021) 7668591

Email: info@bsnp-indonesia.org
Website: <http://www.bsnp-indonesia.org>

Pengantar Redaksi

Pembaca yang budiman. Alhamdulillah, Buletin BSNP edisi perdana tahun 2013 dapat terbit tepat waktu. Seiring dengan adanya pergantian staf profesional BSNP, pengelola bullettin BSNP mulai awal tahun 2013 ini juga mengalami perubahan. Kaharuddin Arafah karena kesibukannya mulai tahun ini tidak lagi menjadi penyunting/editor. Sementara Arief Rifai Dwiyanto telah bergabung sebagai desain gafis dan fotografer.

Edisi kali ini mengangkat isu tentang penyelenggaraan Ujian Nasional tahun 2013. Nasib Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) yang dibatalkan Mahkamah Konstitusi juga kami sajikan. Artikel tentang Paradigma Pendidikan Nasional Abad XXI dan *book review* juga kami sajikan untuk melengkapi penerbitan edisi perdana ini. Tidak ketinggalan pula adalah kegiatan BSNP dalam bentuk lensa/foto. Selamat membaca.

Daftar Isi

3-8	Paradigma Pendidikan Nasional Abad XXI
9-11	Book Review: Mewujudkan Keberagaman yang Operasional
12-18	Penyelenggaraan Ujian Nasional 2013
19-21	Berita BSNP: - Mahkamah Konstitusi Batalkan RSBI - Kegiatan BSNP Tahun 2013
22-24	Lensa BSNP

Keterangan Gambar Cover

Deret depan, dari kiri ke kanan, Jamaris Jamna Anggota BSNP, Hamid Muhammad Dirjen Pendidikan Dasar, Gunawan Indrayanto Anggota BSNP, Joko Santoso Dirjen DIKTI, dan M. Aman Wirakartakusumah Ketua BSNP, berbicang-bincang tentang persiapan penyelenggaraan UN Tahun 2013 (atas). Dari kiri ke kanan, nara sumber rapat koordinasi penyelenggaraan UN tahun 2013, Hamid Muhammad Dirjen Pendidikan Dasar, Joko Santoso Dirjen DIKTI, M. Aman Wirakartakusumah Ketua BSNP, dan Djemari Mardapi Ketua Penyelenggara UN Tingkat Pusat (bawah).

PARADIGMA PENDIDIKAN NASIONAL ABAD XXI

(Bagian VII)

Tim BSNP

4.1. Konteks Pengembangan Paradigma Pendidikan Nasional

Pengembangan paradigma pendidikan nasional harus dikaitkan dengan falsafah pendidikan progresif yang ditekankan pada pentingnya peran serta aktif para pembelajar (*the learners*) dalam penetapan tujuan yang mengarahkan segenap aktivitas mereka masing-masing dalam keseluruhan proses pembelajaran menuju tercapainya kedamaian, kesejahteraan, dan kebahagiaan (John Dewey, dikutip oleh Ackoff & Greenberg, 2008). Pendidikan pada hakekatnya adalah proses penemuan diri yang berlangsung sepanjang hayat untuk mengaktualisasikan potensi yang dimiliki seseorang secara penuh, yang memberikan kepuasan dan makna pada kehidupannya.

Semenjak dua abad yang pertama dari Revolusi Industri, pendidikan cenderung diarahkan pada peningkatan kemampuan baca-tulis-berhitung (*reading, writing, arithmetic*) guna menghasilkan tenaga kerja terampil untuk menjalankan roda industri. Makna hakiki pendidikan sebagai '*a lifelong process of self-discovery*' nyaris terlupakan. Pendidikan secara masal pun berkembang tanpa kendali, memperlakukan murid sebagai bahan mentah yang diproses secara 'mekanistik' untuk menghasilkan produk akhir yang 'bisa dijual'.

Dari lima muara pengembangan pendidikan: sains, teknologi, ekonomi, etika, dan estetika, tiga muara yang

disebut terdahulu yang diutamakan. Padahal muara etika yang menyangkut perilaku, kesantunan, keadaban sangat penting bila mengingat kembali bahwa pendidikan adalah pengawal peradaban (*the guardian of civilization*).

Demikian juga aspek estetika, yang bertautan dengan keindahan sebagai produk dari aktivitas kreatif dan rekreatif; selama ini kurang memperoleh perhatian. Akibatnya, baik lingkungan alam maupun lingkungan binaan yang semula asri, selaras, serasi, seimbang, penuh harmoni, sekarang menjadi kian bertambah rusak, jelek dan membahayakan kehidupan manusia, terutama generasi mendatang.

Paradigma pendidikan yang terlalu terfokus pada kepentingan pragmatis, *teaching mind* melalui *drill & skill* sekarang perlu diseimbangkan dengan tujuan ideal *touching heart* melalui *ethics & esthetics*. Mesti disegarkan kembali bahwa pendidikan merupakan kekuatan moral dan intelektual yang berjalan seimbang, tidak boleh timpang.

Selama ini nampak bahwa pendidikan di Indonesia terlalu menekankan aspek intelektualitas, kurang memperhatikan aspek moralitas. Lebih banyak berkutat tentang pemenuhan kepentingan pasar dan industri, ketimbang pengembangan karakter dan kearifan. Lebih disibukkan dengan urusan pencarian dana daripada mengembangkan ilmu yang autentik. Padahal Washburn (2005) sudah mengingatkan bahwa "*The greatest threat to the future of higher education is the intrusion of a market ideology into the heart of academic life.*" Dalam konteks pedagogik, tak kalah penting untuk diungkapkan tentang suasana demokratis yang harus diciptakan agar setiap pembelajar berani menyampaikan gagasan, bila perlu berdebat, kendati dengan cara yang santun.

Dialog antara guru dengan murid yang mengalir lancar dan melibatkan tema yang luas bagi murid akan menjadi

sangat menyenangkan, menumbuhkan rasa percaya diri, tidak takut berbuat salah, berani mengambil resiko, dan tertantang mencoba hal-hal baru. Sekolah dan kampus menjadi tempat yang selalu menarik, belajar sambil bermain, dan sarat dengan tantangan. Mereka juga akan belajar saling menghargai dan saling menghormati, yang sangat bermanfaat dalam kehidupan nyata di luar sekolah.

Paradigma pendidikan yang demokratis, bermuansa permainan, penuh keterbukaan, menantang, melatih rasa tanggung jawab, akan merangsang anak didik untuk datang ke sekolah atau ke kampus karena senang, bukan karena terpaksa. Meminjam kata-kata Ackoff & Greenberg (2008) : *“Education does not depend on teaching, but rather on the self-motivated curiosity and self-initiated actions of the learner.”*

4.2. Transisi ke Abad XXI

Kenyataan memperlihatkan bahwa perubahan tata kehidupan abad XX lebih sering terjadi baik dalam magnitudo maupun keragamnya, dibandingkan dengan perubahan selama 1000 tahun sebelumnya. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa perubahan itu didorong oleh tatanan sosioekonomik abad XIX, yang didesakkan oleh revolusi industri. Pada kesempatan berikutnya revolusi itu memacu dan memicu kebutuhan teknologik, ilmu pengetahuan dan sosial budaya dalam arti memerlukan tenaga trampil, cerdas dan terdidik untuk mengelola perubahan itu. Tidak kalah pentingnya ialah berkembangnya modus ilmu pengetahuan dalam ranah produksi keilmuan. Kita juga mencatat bahwa dalam abad XX itu, gagasan dan manusia tidak hanya merambah ke jagad renik dan menemukan material baru sebagai soko guru ilmu pengetahuan, tetapi juga melahirkan konsep, gagasan dan aksi menjelajah alam dalam 3-dimensi, sebagai perluasan usaha sebelumnya untuk menguasai bumi melalui usaha 2-dimensional. Bersamaan dengan itu tumbuh tantangan dan perkembangan etos serta gairah penelitian alam dan hakikatnya.

Sementara itu kita juga mencatat bahwa pada abad XX merebak Perang Dunia yang meminta korban 43 juta manusia, tetapi juga mendudukan ber-

bagai kelompok bangsa dalam pinggiran perang dingin yang sangat menghantui kemanusiaan. Kesalahan dan teror dalam mengelola kemampuan perlombaan persenjataan nuklir mengancam perjalanan bangsa-bangsa dalam setiap kelok peradaban. Kini pada abad XXI, walaupun harus diakui masih adanya ancaman ledakan nuklir sebagai penghasil energi pemusnah yang belum terkalahkan, umat manusia masih harus mewaspada adanya ancaman lain yang berkembang dari dalam laboratorium ilmu pengetahuan mulai dari pemanfaatan bioteknologi sampai kepada kecanggihan perlombaan persenjataan dan perusakan lingkungan karena tidak terkontrolnya virus buatan. Manusia juga disadarkan bahwa beberapa penyakit jenis baru tidak dapat diabaikan begitu saja. Begitu juga dengan ancaman alami yang datang dari gesekan lempeng benua, maupun dari simpanan magma yang terkungkung, daya sembur dan ledak gunung api. Ulah manusia sendiri ikut memberi aksen pemanasan angkasa bumi yang dapat berlanjut pada perusakan lingkungan. Kemajuan ilmu pengetahuan juga memperhatikan bahwa bumi kita bukan wahana antariksa yang niscaya aman bagi kemanusiaan.

Hikmah dari semua ini yang dapat kita tarik adalah terlihatnya ubahan peta dunia yang tampak tidak lagi hanya pembagian menurut sekat ideologi atau geografis, yang makin lama makin pudar. Namun, secara virtual terdapat sekat teknologik dan saintifik. Hampir semua bangsa mendekatkan diri dengan penguasa pasar global, yang ditandai dengan atribut penguasaan teknologi dan inovasinya. Mereka yang tidak dapat meraihnya harus rela tergeser kepinggiran dan tertinggal di belakang dalam percaturan bangsa di dunia model baru itu.

4.3. Tujuan Pendidikan Nasional Abad XXI

Adalah cita-cita setiap bangsa untuk mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan bagi seluruh rakyatnya, dan hidup sejajar dan terhormat di kalangan bangsa-bangsa lain. Demikian pula bangsa Indonesia bercita-cita untuk hidup dalam kesejahteraan dan kebahagiaan, duduk sama rendah dan

tegak sama tinggi serta terhormat di kalangan bangsa-bangsa lain di dunia global dalam abad XXI ini. Semua ini dapat dan harus dicapai dengan kemauan dan kemampuan sendiri, yang hanya dapat ditumbuh-kembangkan melalui pendidikan yang harus diikuti oleh seluruh anak bangsa. Kata kunci dalam pendidikan ini adalah *kemandirian*.

Dengan demikian, tujuan pendidikan nasional dapat dirumuskan sebagai berikut ini.

Pendidikan Nasional abad XXI bertujuan untuk mewujudkan cita-cita bangsa, yaitu masyarakat bangsa Indonesia yang sejahtera dan bahagia, dengan kedudukan yang terhormat dan setara dengan bangsa lain dalam dunia global, melalui pembentukan masyarakat yang terdiri dari sumber daya manusia yang berkualitas, yaitu pribadi yang mandiri, berkemauan dan berkemampuan untuk mewujudkan cita-cita bangsanya.

Dengan kata kesejahteraan tercakup *kesejahteraan spiritual* yang mungkin lebih tepat dikatakan sebagai *kebahagiaan dalam kehidupan*, dan *kesejahteraan fisik* yang dapat pula dikatakan sebagai *hidup yang berkecukupan*.

Terwujudnya kesejahteraan spiritual atau kebahagiaan dalam kehidupan suatu masyarakat tercermin dalam bentuk kehidupan bermasyarakat yang nyaman, mulai dari lingkungan rumah tangga sampai ke lingkungan antarbangsa dengan saling dihormati dan menghormati. Ini semua hanya akan tercapai, bila masing-masing anggota masyarakat berpegang pada nilai-nilai luhur yang tercermin dalam sikap dan perbuatan, yang antara lain saling menghormati dan saling menghargai, memiliki rasa kebersamaan, empati, dan sebagainya. Di samping itu masing-masing anggota masyarakat itu memiliki pula sikap-sikap yang terpuji, yaitu kesediaan dan kemauan untuk saling membantu dan berbuat untuk kemanfaatan bersama, termasuk juga menaati kesepakatan bersama yang dapat terungkap mulai dari berbagai aturan dalam keluarga, sampai dengan peraturan dan perundangan lokal dan nasional, serta antarbangsa.

Kesejahteraan material atau hidup

berkecukupan adalah kehidupan yang terbebas dari kemiskinan, walaupun tidak harus berupa kemewahan. Ini akan dapat terwujud bila masing-masing warga negara memiliki dan menguasai kecakapan dan keilmuan, yang disertai dengan kemauan dan kemampuan memanfaatkannya untuk kepentingan bersama. Penguasaan ilmu bukan hanya menguasai materi ilmu semata, melainkan juga memiliki sikap keilmuan dan sikap terhadap ilmu.

Uraian di atas dapat dipandang sebagai kunci untuk mengelaborasi dan menjabarkan lebih lanjut pengertian sumber daya manusia yang berkualitas yang diungkapkan dalam tujuan pendidikan yang dikemukakan di atas. Dari sini pulalah dapat dirumuskan paradigma pendidikan nasional kita, yang kalau diringkaskan adalah menanamkan nilai-nilai luhur serta menumbuh-kembangkan sikap hidup yang terpuji, di samping memberikan pengetahuan dan kecakapan yang mengikuti perkembangan zaman.

Dalam abad XXI terdapat berbagai kekhususan yang utama. Yang pertama adalah terwujudnya masyarakat global yang menjadi kesepakatan antarbangsa, yaitu terbukanya mobilitas yang lebih luas antara satu negara dengan negara lain dalam berbagai hal. Yang kedua adalah bahwa abad XXI akan lebih dikuasai oleh perkembangan ilmu dan teknologi yang makin canggih dan berpadu pula dengan ilmu sosial dan humaniora, sebagaimana telah diuraikan dalam bab III. Agar mampu berkompetisi dalam masyarakat global tersebut, setiap bangsa bukan hanya harus menguasai perkembangan ilmu dan teknologi, tetapi juga mempunyai penguasaan yang cukup pula atas sains sosial dan humaniora serta perkembangannya.

Dalam abad ini masing-masing ilmu tidak lagi harus atau dapat bekerja sendiri, melainkan berbagai cabang ilmu dapat dan harus bekerja sama, bukan hanya dalam sesama kelompok sains, teknologi, atau sains sosial dan humaniora saja, melainkan dalam banyak hal antara berbagai kelompok ilmu.

Walaupun perkembangan sains dan teknologi canggih adalah konsumsi perguruan tinggi, namun kesiapan

mahasiswa menyerapnya sangat ditentukan oleh hasil pendidikan pra universitas, mulai dari jenjang pendidikan dasar sampai ke jenjang pendidikan menengah, bahkan mulai dari PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini).

Dengan demikian rangkaian setiap jenjang pendidikan, sekurang-kurangnya mulai jenjang pendidikan dasar sampai dengan jenjang pendidikan tinggi, dan sedapat-dapatnya mulai dari PAUD haruslah merupakan rantai-rantai yang masing-masing terdiri dari mata rantai dengan ciri khasnya dan semuanya tersambung secara utuh. Walaupun demikian, pada rangkaian rantai suatu jenjang ke rantai jenjang berikutnya perlu diberi cabang, yaitu rantai yang mengarah ke pendidikan lanjut (pendidikan akademik) dan rantai yang mengarah ke persiapan memasuki masyarakat (pendidikan kejuruan, vokasi, dan profesi).

Demikian pula untuk menghadapi dunia global ini usaha meningkatkan mutu pendidikan sampai bertaraf internasional adalah suatu keharusan, namun bukan dengan mempertentangkan atau membedakan yang satu dengan yang lain dengan berbagai sebutan. Sekalipun demikian, menanamkan rasa kebangsaan dan penghayatan dan kemampuan menghargai budaya nasional merupakan tema yang harus selalu dilakukan di setiap jenjang pendidikan.

4. Paradigma Pendidikan Nasional Abad XXI

Sebagai bangsa yang mempunyai harga diri dan yang telah mengacungkan unggulan berbudaya, kita tidak dapat menutup mata serta telinga, berdiam diri, acuh terhadap daya guna pembaharuan ilmu dan pemanfaatan ilmu pengetahuan serta teknologi untuk kebaikan umat manusia. Kebangunan dan citra bangsa baru akan terlihat jika kita ikut berlomba dalam peradaban dengan menyumbangkan karya, pikiran dan keagungan pikir dalam tatanan dunia yang baru. Usaha kita itu terutama untuk kepentingan dan keselarasan pembangunan bangsa menghadapi ekonomi dan sosial yang sadar-pengetahuan, dan penciptaan manusia berkapasitas pemecah soal. Kita ikut mengisi khazanah ilmu pengetahuan teoretis maupun terapan sambil me-

mancarkan wawasan dan kemitraan yang murni.

Bersamaan dengan pembaharuan hidup berkebangsaan dengan ekonomi dan sosial sadar-pengetahuan kita membangun manusia **berdaya cipta, mandiri dan kritis** tanpa meninggalkan wawasan tanggungjawab membela sesama untuk diajak maju menikmati kemampuan yang disediakan abad ini. Berdaya cipta ialah menggenggam pengertian bahwa sosok tersebut dapat menghasilkan sesuatu yang asli dan khas dan, tentunya, berguna bagi penyelenggaraan hidup terhormat. Seperti kita pahami sosok seperti ini adalah mereka yang tidak hanya dapat membangkitkan satu jawaban mutlak menurut resep. Tetapi mereka adalah sosok yang mampu menghasilkan pemikiran berangkai, yakni menyediakan berbagai gagasan khas namun, pada akhirnya dia harus mampu memilah dan menentukan yang terbaik. Hal ini harus tampak pada modus pendidikan masa kini yang tidak hanya mengagungkan satu alur pemikiran saja.

Dalam hubungan ini kita ditantang untuk mencipta tata-pendidikan yang dapat ikut menghasilkan sumber daya pemikir yang mampu secara mandiri ikut membangun tatanan sosial dan ekonomi sadar-pengetahuan seperti laiknya warga abad XXI. Mereka harus terlatih mempergunakan kekuatan argumen dan daya pikir, alih-alih kekuatan fisik konvensional. Dan yang tak kalah pentingnya, dengan kenyataan bahwa penguasaan serta akses teknosains yang bukan lagi didominasi oleh dunia akademis, mereka harus memiliki kreativitas tinggi yang diperlihatkan dengan kentalnya sifat inovatif dan inventif dalam karya-karya orisinal mereka. Tentu saja dalam memandang ke depan dan merancang langkah kita tidak boleh sama sekali berpaling dari kenyataan yang mengikat kita dengan realita kehidupan. Indonesia masih menyimpan banyak kantong-kantong kemiskinan, wilayah kesehatan umum yang tidak memadai dan kesehatan kependudukan yang rendah serta mutu umum pendidikan yang belum dapat dibanggakan. Masalah-masalah ini memerlukan perhatian dan upaya yang serius, taat azas dan, tidak kurang pentingnya, dana. Kita juga

masih menyandang kewajiban luhur membawa kelompok-kelompok terpencil dan belum terendus pendidikan dalam cakupan berbangsa. Kewajiban kita adalah mengangkat dan mengajak mereka agar dapat bersama-sama merasakan kenyamanan zaman baru, apakah itu manfaat dari energi, komunikasi, layanan kesehatan maupun hak dalam alam demokrasi dan hak di hari tua.

Sederet falsafah dan kebijakan tradisional yang berkembang dalam kehidupan kita dan terangkum sebagai budaya bangsa, telah ikut menerapkan dan merawat lingkungan hidup alami. Namun masuknya budaya asing, yang kurang empati terhadap kehidupan lingkungan telah mencabut akar kebaikan itu dari lingkungan tanpa daya kita untuk mencegahnya. Nurani dan akal sehat haruslah menjadi ciri dalam pendidikan dalam abad XXI yang tak lagi mengenal batas geografi.

Memasuki abad XXI, terasa begitu banyak hal yang berubah secara fundamental dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Runtuhnya sekat-sekat geografis akibat agenda globalisasi dan kemajuan teknologi informasi telah mengubah dunia ini menjadi sebagaimana layaknya sebuah desa raksasa yang antar penghuninya bukan saja dapat dengan mudah saling berinteraksi, berkomunikasi, dan bertransaksi kapan saja serta dari dan di manapun mereka berada, tetapi juga berkonflik. Karena itu dampak yang ditimbulkan dari perubahan lingkungan dunia membengkak luar biasa seperti yang antara lain diperlihatkan melalui sejumlah fenomena berikut:

Mengalirnya beragam sumber daya fisik maupun non-fisik (data, informasi, dan pengetahuan) dari satu tempat ke tempat lainnya secara bebas dan terbuka. Ini telah merubah total lingkup bisnis dan lingkup usaha yang selama ini terlihat mapan;

Meningkatnya kolaborasi dan kerjasama antar negara dalam proses penciptaan produk dan/atau jasa yang berdaya saing tinggi dan secara langsung maupun tidak langsung telah menggeser kekuatan ekonomi dunia dari "barat" menuju "timur" dari "utara" ke 'selatan';

Menguatnya tekanan negara-negara

maju terhadap negara berkembang untuk secara total segera menerapkan agenda globalisasi yang disepakati bersama memaksa setiap negara untuk menyerahkan nasibnya pada mekanisme ekonomi pasar bebas dan terbuka yang belum tentu mendatangkan keuntungan bagi semua pihak yang terlibat;

Membanjirnya produk-produk dan jasa-jasa negara luar yang dipasarkan di dalam negeri selain meningkatkan suhu persaingan dunia usaha juga berpengaruh langsung terhadap pola pikir dan perilaku masyarakat dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari;

Membludaknya tenaga asing dari level buruh hingga eksekutif memasuki bursa tenaga kerja nasional telah menempatkan sumber daya manusia lokal pada posisi yang cukup dilematis di mata industri sebagai pengguna; dan

Meleburnya portofolio kepemilikan perusahaan-perusahaan swasta menjadi milik bersama pengusaha Indonesia dan pihak asing di berbagai industri strategis tanpa disadari menjadi jalan efektif masuknya budaya luar ke tengah-tengah masyarakat tanah air.

Berbagai fenomena tersebut tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi merambah ke hampir semua negara berkembang dan bahkan beberapa negara maju di dunia barat pun merasakan tantangan yang sungguh hebat akibat munculnya kekuatan-kekuatan baru seperti Brasil, Cina, India, dan Taiwan.

Dengan menarik pelajaran dari perkembangan tersebut di atas, paradigma pendidikan nasional abad XXI dapat dirumuskan sebagai berikut:

Untuk menghadapi abad XXI yang makin syarat dengan teknologi dan sains dalam masyarakat global, maka pendidikan kita haruslah berorientasi pada ilmu pengetahuan matematika dan sains alam disertai dengan sains sosial dan kemanusiaan (humaniora) dengan keseimbangan yang wajar.

Pendidikan ilmu pengetahuan bukan hanya membuat seorang peserta didik berpengetahuan, melainkan juga menganut sikap keilmuan, yaitu kritis, logis, inventif dan inovatif, serta konsisten, namun disertai pula dengan kemampuan beradaptasi secara sosial. Di samping memberikan ilmu pengetahuan, pendidikan harus disertai dengan pamrih menanamkan

nilai-nilai luhur dan menumbuh kembangkan sikap terpuji untuk hidup dalam masyarakat yang sejahtera dan bahagia di lingkup nasional maupun di lingkup antarbangsa dengan saling menghormati dan saling dihormati.

Untuk mencapai tujuan ini mulai dari pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, menengah dan pendidikan tinggi haruslah merupakan suatu sistem yang tersambung erat tanpa celah, setiap jenjang menunjang penuh jenjang berikutnya, menuju ke *frontier* ilmu. Namun demikian penting pula bahwa pada akhir setiap jenjang, di samping jenjang untuk ke pendidikan berikutnya, terbuka pula jenjang untuk langsung terjun ke masyarakat.

Bagaimanapun juga, pada setiap jenjang pendidikan perlu ditanamkan jiwa kemandirian, karena kemandirian pribadi mendasari kemandirian bangsa, kemandirian dalam melakukan kerjasama yang saling menghargai dan menghormati untuk kepentingan bangsa.

Khusus di perguruan tinggi, dalam

menghadapi konvergensi berbagai bidang ilmu pengetahuan, maka perlu dihindarkan spesialisasi yang terlalu awal dan terlalu tajam.

Dalam pelaksanaan pendidikan perlu diperhatikan kebhinnekaan etnis, budaya, agama dan sosial, terutama di jenjang pendidikan awal. Namun demikian, pelaksanaan pendidikan yang berbeda ini diarahkan menuju ke satu pola pendidikan nasional yang bermutu.

Untuk memungkinkan semua warganegara mengenyam pendidikan sampai ke jenjang pendidikan yang sesuai dengan kemampuannya, pada dasarnya pendidikan harus dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat dengan mengikuti kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah (pusat dan daerah).

Untuk menjamin terlaksananya pendidikan yang berkualitas, perlu dikembangkan sistem monitoring yang benar dan evaluasi yang berkesinambungan serta dilaksanakan dengan konsisten. Lembaga pendidikan yang tidak menunjukkan kinerja yang baik harus ditutup. (*bersambung*)

Inna lillahi wa inna ilaihi raijun

Ketua dan Anggota BSNP beserta seluruh jajaran
staf sekretariat dan keuangan

Turut berbela sungkawa dan berduka cita
yang sedalam-dalamnya atas berpulangnya ke rahmatullah

Ibu Keriyam
(85 tahun)

Ibunda dari Prof. Dr. Djemari Mardapi
Anggota BSNP

pada pukul 08.00, hari Senin, tanggal 7 Januari 2013.
Rumah duka di Jalan Garuda No. 13 Gejayan Yogyakarta.

Semoga Allah menerima segala amal kebajikan almarhumah, melimpahkan rahmat dan maghfirah serta menempatkan arwahnya di tempat yang mulia.
Amin.

Mewujudkan Keberagaman yang Operasional

Weinata Sairin*)

Judul buku : Selamat Berjuang

Penulis : Dr. Andar Ismail

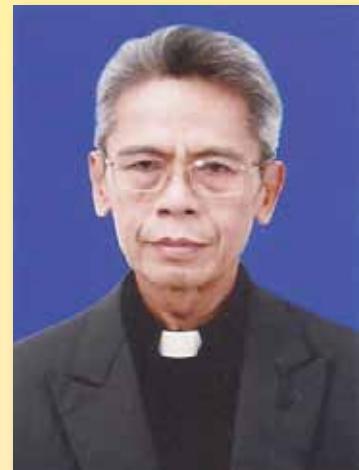
Penerbit : BPK Gunung Mulia, Jakarta, 2012

Indonesia adalah sebuah Negara yang beragama, yang masyarakatnya menganut berbagai agama. Fakta ini merupakan sesuatu yang tidak terbantahkan. Dalam konteks itu maka istilah "agama" dapat ditemui dalam berbagai ketentuan peraturan perundangan, mulai dari undang-undang dasar, undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, hingga peraturan yang ada di bawahnya. Dizaman baheula ketika Indonesia masih memiliki GBHN, sebelum UUD 1945 diamanahkan, dokumen itu dengan tegas menyatakan bahwa agama-agama memberikan landasan moral, etik, spiritual bagi pelaksanaan pembangunan sebagai pengamalan Pancasila.

Sesudah peristiwa G.30S. PKI September 1965, agama-agama seakan dibangkitkan lagi. Spanduk diberbagai tempat membunyikan pentingnya agama. Bahkan masyarakat Indonesia diwajibkan memeluk suatu agama.

Apakah kondisi itu semua telah menjadikan manusia Indonesia benar-benar beragama secara utuh, penuh, kaffah? Ternyata tidak semudah itu. Budayawan Mochtar Lubis dalam suatu pidato kebudayaan di Taman Ismail Marzuki th 1970an menyatakan manusia Indonesia adalah manusia yang hipokrit/munafik. Walaupun pandangan itu mendapat protes keras dari berbagai kelompok, tetapi realitas empirik manusia Indonesia memang sejalan dengan apa yang dikatakan Mochtar Lubis.

Ada keberagamaan yang parsial, keberagamaan yang hanya muncul temporer, sesaat, disuatu waktu dan tempat tertentu. Soedarmono dalam kapasitasnya sebagai Wapres di zamannya



pernah menyatakan bahwa rumah-rumah ibadah selalu penuh sesak oleh umat, tetapi penjara juga makin penuh.

Dizaman ini realitas keberagamaan umat, mewujudkan arah yang lebih baik. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014 (RPJMN) menyatakan bahwa, semangat kehidupan keagamaan masyarakat menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Hasil survei yang dilakukan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama pada tahun 2007 terhadap masyarakat Muslim di 13 Provinsi, antara lain memperlihatkan bahwa tingkat ketiaatan masyarakat Muslim dalam menjalankan berbagai aktivitas ibadah termasuk dalam kategori sangat tinggi. Sekitar 92,0 persen masyarakat mengatakan selalu/cukup sering menunaikan shalat lima waktu, 63,5 persen melaksanakan shalat secara berjamaah, 97,3 persen menjalankan puasa di bulan Ramadhan, dan 77,0 persen mengeluarkan zakat/infak. Sementara itu, data yang sama memperlihatkan bahwa tingkat rata-rata masyarakat yang cukup/sangat sering mendengarkan ceramah agama mencapai 85,2 persen, membaca buku agama 56,7 persen, membaca informasi keagamaan di media cetak 37,9 persen, menonton siaran keagamaan di televisi

*) Anggota BSNP dan Teolog

65,9 persen, dan mendengarkan siaran keagamaan di radio 48,2 persen.

Pada sisi lain dokumen itu juga menyatakan bahwa semangat keagamaan di masyarakat tersebut masih menunjukkan adanya kesenjangan keberagamaan. *Pertama*, ada kesenjangan antara nilai-nilai ajaran agama dan pemahaman para pemeluknya. Tingginya semangat keberagamaan masyarakat pada satu sisi belum diimbangi dengan pemahaman yang memadai pada sisi lain. *Kedua*, ada kesenjangan antara pengetahuan agama dan pengamalannya yang tercermin dalam sikap dan perilaku. *Ketiga*, agama sebagai daya tangkal terhadap kecenderungan manusia berperilaku menyimpang belum cukup optimal. Berkembangnya aliran sempalan dan berkembangnya ideology-ideologi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa menunjukkan bahwa agama belum sepenuhnya mampu membangun kesadaran, menggugah nurani dan spiritual sikap individu dalam perilaku keseharian. *Keempat*, agama belum sepenuhnya menjadi motivasi dalam pembangunan nasional. Dengan demikian, *tantangan yang dihadapi adalah meningkatkan semangat keagamaan masyarakat dalam sikap dan perilaku sosial meliputi upaya peningkatan pengetahuan dan pemahaman nilai-nilai ajaran agama pada masyarakat sehingga menjadikan agama sebagai motivasi dalam pembangunan nasional*.

Harmonisasi sosial dan kerukunan di kalangan umat beragama belum terwujud. Kerukunan umat beragama merupakan pilar bagi terwujudnya kerukunan nasional. Kerukunan umat beragama juga merupakan modal sosial yang harus dijaga dan dikelola sebagai salah satu potensi dalam pembangunan bangsa. Masalah yang dihadapi adalah bahwa kehidupan harminis di dalam masyarakat belum sepenuhnya dapat diwujudkan, antara lain akibat munculnya ketegangan sosial yang sering melahirkan konflik intern dan antarumat beragama. Konflik yang pada mulanya sebagai dampak ketimpangan sosial dan ketidakadilan ekonomi seringkali memanfaatkan sentimen keagamaan. Sebagian konflik juga terjadi

karena pendirian rumah ibadat yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, corak pemahaman keagamaan yang cenderung ekslusif dan radikal, dan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Menurut RPJMN, hasil penelitian Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama tahun 2008 terhadap surat kabar daerah selama periode 2004-2007 menunjukkan bahwa telah terjadi sebanyak 444 insiden konflik terkait isu keagamaan di 10 provinsi. Dari jumlah tersebut, sebanyak 368 (83 persen) insiden konflik berupa aksi damai, sedangkan 76 (17 persen) kasus lainnya berupa aksi kekerasan. Dalam periode yang sama, insiden kekerasan yang terkait isu keagamaan itu telah berdampak pada korban manusia sebanyak 233 orang (7 orang tewas, 178 orang luka, dan 48 orang mengungsi), serta kerusakan property sedikitnya 104 bangunan (79 rumah, 11 rumah ibadat, dan 14 bangunan lainnya). Dari 76 insiden kekerasan yang terjadi, 41 insiden (53,9 persen) terkait dengan isu moral dan 21 insiden (27,6 persen) lainnya terkait dengan isu sektarian atau konflik intern-umat beragama. Adapun jumlah insiden yang terkait dengan isu komunal atau konflik antarumat beragama berjumlah 10 insiden (13,2 persen). Hal ini sejalan dengan hasil temuan dari studi Balitbang kementerian Agama (2008) yang memperlihatkan bahwa isu komunal (antar-umat beragama) lebih mendominasi konflik keagamaan di wilayah Indonesia Bagian Timur. Sementara itu, wilayah Indonesia bagian barat lebih banyak menghadapi insiden kekerasan terkait isu moral dan sektarian (intra-umat beragama). Bentuk kekerasan antara lain yang lebih ekstrem adalah serangan terror atau terorisme yang mengatasnamakan agama.

Sejak dibentuknya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) tahun 2006 di tingkat provinsi, dan di beberapa kabupaten/kota, serta di tingkat kecamatan, keharmonisan kehidupan umat beragama telah mulai tampak dan dirasakan hasilnya. Hal ini diperlihatkan dengan intensitas aktivitas keagamaan dan semangat kerjasama lintas agama. Akan tetapi, fakta tersebut tidak berarti telah menghapus seluruh persoalan yang muncul dalam hubungan umat

beragama. Kerukunan atau keharmonisan hubungan umat beragama nukan sesuatu yang terjadi dengan sendirinya dan bukan pula sesuatu yang kebal (*immune*). Kondisi kerukunan dan keharmonisan umat beragama berjalan terus mengikuti gerak dinamika sosial, politik, ekonomi, dan globalisasi yang juga turut mewarnai pola kehidupan masyarakat.

Salah satu upaya untuk membina keimanan umat agar mereka memiliki keberagamaan yang utuh penuh dan implementatif adalah penulisan buku-buku bacaan keagamaan yang bisa dicerna umat dengan baik.

Andar Ismail (72 tahun) yang mendapat gelar doktor ilmu pendidikan (Ed.D) di Presbyterian School of Christian Education di Virginia amat dikenal sebagai penulis buku. Buku-bukunya yang diberi label Seri Selamat yang berisi 33 renungan tentang suatu topic tertentu, menjadi best seller dan kini telah mencapai seri ke 23, sejak ia memulainya tahun 1981.

Dalam buku yang terbaru berjudul "Selamat Berjuang" dengan bahasa yang mudah dipahami Andar menjelaskan kepada pembacanya bahwa hakikat hidup itu adalah sebuah perjuangan yang tiada akhir. Seseorang harus teguh, kuat dan tegar dalam berhadapan dengan penderitaan apapun. Dengan mengutip kata-kata dari Kitab Suci, Andar mengingatkan pembacanya "masakan kita hanya mau menerima apa yang baik dari Allah sedangkan yang tidak kita tolak?" Andar menggunakan metafora buah dalam menjelaskan penderitaan.

Berkata Andar "Penderitaan terasa masam karena kita lahir menyukai hidup yang serba manis. Tetapi bukankah tiap jenis buah mengandung campuran rasa? Semanis-manisnya jeruk, disitu juga ada masamnya. Sebaliknya, semasam-masam sirsak, disitu juga terdapat rasa manisnya (halaman 3,4).

Dalam bukunya ini Andar juga berkisah tentang Swami Vivekenanda (1863-1902) biarawan Hindu yang terkenal keseluruh dunia karena sikap dan pemikirannya diwarnai apresiasi dan respek terhadap manusia tanpa mempertimbangkan latarbelakang seorang, baik kasta maupun agamanya. Vivekenanda yang berpengaruh ter-

hadap Mahatma Gandhi berkata "tiap orang mempunyai potensi Ilahi, selain potensi untuk mengasihi, sebab itu tujuan pendidikan adalah menolong orang mewujudkan potensi itu kepada orang-orang disekitarnya".

Apa yang Andar kisahkan tentang hasrat juang?. Hasrat juang adalah kemauan seseorang untuk mengembangkan potensi dirinya sehingga ia mencapai nilai yang optimal, yang berada diatas rata-rata. Menurut Andar petenis atau pemusik yang memiliki hasrat juang yang rendah, prestasinya minimal; tetapi mereka yang punya hasrat juang tinggi akan menuai hasil optimal.

Hal tersebut berkaitan dengan apa yang di katakana dalam Kitab Suci "apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia".

Semua pekerjaan yang dilakukan dengan motivasi mempersembahkannya bagi Tuhan, akan dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan bermuara pada prestasi yang bagus.

Buku Selamat Berjuang yang ditulis Andar Ismail menyuguhkan materi pendidikan yang amat relevan ditengah pergeseran nilai yang tengah menggerus kehidupan manusia modern. Ia mampu mengaktualisasi ajaran agama melalui contoh, metafora, pengalaman tokoh-tokoh dunia, sehingga pembaca terbantu untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik.

Kekuatan Andar terletak pada kepiawaiannya mengolaborasi ayat-ayat Kitab Suci sehingga dapat dipahami umat dengan tepat, penguasaannya terhadap berbagai khazanah pemikiran dari lingkungan agama dan dunia sekuler, mengartikulasikan pemikirannya secara cerdas dan benar.

Buku-buku semacam ini amat diperlukan bagi umat yang sedang mengembara didunia luas, agar mereka tetap tegar dan *survive*. Ajaran-ajaran agama, minimal dari 6 agama yang ada di Indonesia, akan sangat membantu jika dapat dirumuskan dalam narasi yang mudah dicerna oleh umat.

Melalui cara itu buku-buku yang bernuansa agama benar-benar menolong sebagai wahana untuk memperdalam keimanan dan ketakwaan umat. ●

Penyelenggaraan Ujian Nasional 2013

Setiap siswa menerima paket soal yang berbeda

Oleh Bambang Suryadi¹

Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) akan menyelenggarakan Ujian Nasional atau UN pada bulan April 2013. Penyelenggaraan UN ini mengacu kepada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 Tentang

dari tanggal 22 sampai dengan 25 April 2013. Sedangkan UN SD/MI dan Progam Paket A/Ula dilaksanakan mulai dari tanggal 22 sampai dengan 24 April 2013. UN SD/MI dilaksanakan mulai tanggal 6 sampai dengan 8 Mei 2013.

Pengumuman kelulusan peserta



Djemari Mardapi Ketua Penyelenggara UN Tingkat Pusat (kanan) memberikan penjelasan tentang persiapan penyelenggaraan UN tahun 2013 dalam rapat pleno BSNP di Jakarta.

Kriteria Kelulusan Peserta Didik dari Satuan Pendidikan dan Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan dan Ujian Nasional.

Untuk UN SMA/MA, SMALB, SMK dan Program Paket C dilaksanakan dari tanggal 15 sampai dengan 18 April 2013. Untuk UN SMP/MTs, SMPLB, dan Program Paket B/Wustha dilaksanakan

didik SMA/MA, SMK dan SMALB dari satuan pendidikan pada tanggal 24 Mei 2013. Pengumuman kelulusan peserta didik SMP/MTs dan SMPLB dari satuan pendidikan pada tanggal 1 Juni 2013. Sedangkan pengumuman kelulusan peserta didik SD/MI dari satuan pendidikan pada tanggal 8 Juni 2013.

¹Staf Profesional BSNP dan dosen Fakultas Psikologi UIN Jakarta



Pengawas ruang ujian dan siswa SMPN di Daerah Istimewa Yogyakarta bersiap-siap memasuki ruang ujian saat pelaksanaan UN pada hari pertama tahun 2012.

Perbandingan UN 2012 dan UN 2013

BSNP sebagai lembaga yang bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan UN, selalu melakukan perbaikan dan peningkatan dalam penyelenggaraan UN. "BSNP selalu melakukan evaluasi penyelenggaraan UN dan berdasarkan hasil evaluasi dan temuan empiris di lapangan tersebut BSNP melakukan perbaikan kualitas penyelenggaraan UN", ucap Djemari Mardapi Ketua Penyelenggara UN Tingkat Pusat.

Usaha peningkatan mutu penyelenggaraan UN tahun 2013 bisa kita lihat melalui perbandingan penyelenggaraan UN tahun 2013 dan tahun lalu. Ada beberapa perbedaan dan persamaan antara UN tahun 2012 dan UN tahun 2013.

UN Pendidikan Kesetaraan (UNPK) yang selama ini dilaksanakan secara terpisah dari UN Formal, mulai tahun 2013 UNPK dilaksanakan secara bersamaan dengan UN Formal. Bedanya UN Formal dilaksanakan pada pagi sampai siang hari, UNPK dilaksanakan pada siang sampai sore hari.

"Kebijakan untuk menyatukan waktu pelaksanaan UN Formal dan UNPK ini dilakukan melalui proses evaluasi yang cukup lama dan untuk mengakomodasi aspirasi dari masyarakat", ungkap Djemari seraya menambahkan tujuannya adalah untuk meningkatkan kredibilitas dan kualitas UNPK.

Perbedaan lainnya adalah jumlah paket soal di setiap ruang ujian. Jika pada UN tahun 2012 jumlah paket soal hanya 5 (lima), pada UN tahun 2013 jumlah paket soal sebanyak 20 (dua puluh). Dengan jumlah paket 20 (dua puluh), maka kredibilitas hasil UN juga akan meningkat, sebab hasil UN akan dijadikan salah satu pertimbangan masuk ke perguruan tinggi.

Kepala Balitbang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Khairil Anwar Notodiputro menyambut baik rencana penggunaan 20 paket soal di setiap ruang ujian. "Dengan jumlah paket sebanyak 20 di setiap ruang ujian, saya optimis kredibilitas dan kejujuran dalam penyelenggaraan UN dapat ditingkatkan", ungkap Khairil dalam rapat



pleno BSNP (22/1/2013) di Jakarta sambil menambahkan pada setiap soal dan LJUN ada barcode sedangkan pada tahun lalu paket soal diidentifikasi dengan huruf dan angka.

Sementara Hari Setiadi Kepala Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik) mengatakan setiap paket soal memiliki tingkat kesulitan yang sama untuk setiap jenjang dan wilayah. "Soal UN di Papua dan di Jawa memiliki tingkat kesulitan yang sama", ungkap Hari Setiadi sambil menambahkan soal tersebut diambil dari bank soal yang disiapkan oleh Puspendik dibawah koordinasi dan pengawasan BSNP.

Tim pembuat soal, tambah Hari Setiadi, adalah para guru mata pelajaran yang dipilih berdasarkan dengan kemampuan dan pengalaman mereka. Soal juga ditelaah oleh dosen dari perguruan tinggi. Dalam mempersiapkan soal UN, diperlukan kehati-hatian dan ketelitian supaya tidak ada soal yang salah atau tidak ada pilihan jawaban.

Terkait dengan peran perguruan tinggi negeri dalam pelaksanaan UN tahun 2013, BSNP memberikan wewenang yang lebih tinggi kepada perguruan tinggi. Diantara wewenang perguruan tinggi adalah memindai LJUN dan mengawasi distribusi naskah soal dan LJUN sampai tempat penyimpanan terakhir. Pengiriman LJUN dari satuan pendidikan ke perguruan tinggi untuk SMA/MA, SMK dan Program Paket C dan dari satuan pendidikan ke Dinas Pendidikan untuk SMP/MTs, juga dilakukan oleh perguruan tinggi.

Menurut Ketua BSNP M. Aman Wirakartakusumah peningkatan peran dan wewenang perguruan tinggi dalam UN ini karena mulai tahun 2013 hasil UN akan dijadikan pertimbangan masuk ke perguruan tinggi.

Pelanggaran dan Sanksi

UN merupakan kegiatan rutin tahunan. BSNP selaku penyelenggara bersama Kementerian Pendidikan dan

Penandatanganan
Pakta Integritas
Penyelenggaraan
Ujian Nasional
oleh Kepala
Dinas Pendidikan
Provinsi.

Kebudayaan selalu melakukan perbaikan dan penyempurnaan untuk meningkatkan kualitas dan kredibilitas penyelenggaraan UN. Salah satunya adalah dengan membuat jenis pelanggaran dan sanksi bagi peserta UN dan pengawas ruang ujian.

Dalam hal ini, ada tiga jenis pelanggaran bagi peserta UN, yaitu pelanggaran ringan, sedang, dan berat. Pelanggaran **ringan** meliputi: (a) meminjam alat tulis dari peserta ujian dan (b) tidak membawa kartu ujian. Pelanggaran sedang meliputi: (a) membuat kegaduhan di dalam ruang ujian dan (b) membawa HP di meja kerja peserta ujian. Pelanggaran **berat** meliputi: (a) membawa contekan ke ruang ujian, (b) kerjasama dengan peserta ujian, dan (c) menyontek atau menggunakan kunci jawaban.

Peserta UN yang melanggar tata tertib UN akan diberi sanksi oleh pengawas ruang UN maupun pengawas satuan pendidikan sebagai berikut. (a) Pelanggaran **ringan** yang dilakukan oleh peserta ujian dengan sanksi diberi peringatan tertulis. (b) Pelanggaran **sedang** yang dilakukan oleh peserta ujian dengan sanksi pembatalan ujian pada mata pelajaran bersangkutan. (c) Pelanggaran **berat** yang dilakukan oleh peserta ujian dengan sanksi dikeluarkan dari ruang ujian dan dinyatakan tidak lulus.

Sedangkan untuk pengawas ruang ujian juga ada tiga jenis jenis pelanggaran, yaitu pelanggaran ringan, sedang, dan berat. Pelanggaran **ringan** meliputi: (a) lalai, tertidur, merokok, dan berbicara yang dapat mengganggu konsentrasi peserta ujian dan (b) lalai membantu peserta ujian mengisi identitas diri sesuai dengan kartu identitas. Pelanggaran **sedang** meliputi: (a) tidak mengelem amplop LJUN di ruang ujian dan (b) memeriksa dan menyusun LJUN tidak di ruang ujian. Pelanggaran **berat** meliputi: (a) memberi contekan, (b) membantu peserta ujian dalam menjawab soal, (c) menyebarkan/membaca kunci jawaban kepada peserta ujian, dan (d) mengganti dan mengisi LJUN

Pengawas ruang UN yang melanggar tata tertib akan diberikan peringatan oleh pengawas satuan pendidikan. Apabila pengawas ruang UN tidak mengindahkan peringatan tersebut, maka yang bersangkutan akan dikenakan sanksi sebagai berikut. (a) pelanggaran **ringan** yang dilakukan oleh pengawas ruang dengan sanksi dibebastugaskan sebagai pengawas ruang ujian; dan (b) pelanggaran **sedang** dan **berat** yang dilakukan oleh pengawas ruang dengan sanksi sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan.

Pakta Integritas

Seperti pelaksanaan UN pada tahun yang lalu, pada tahun ini juga tetap diadakan penandatanganan pakta integritas. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kredibilitas, akseptabilitas dan kualitas penyelenggaraan UN sehingga hasilnya bisa diterima oleh semua pihak.

Pada tanggal tanggal 28 Februari 2013 telah dilakukan penandatanganan pakta integritas antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan perwakilan dari Dinas Pendidikan Provinsi serta Penyelenggara UN Tingkat Provinsi. Acara ini dilakukan bersamaan dengan kegiatan rapat koordinasi penyelenggaraan UN tahun 2013. Dari Dinas Pendidikan Provinsi diwakili oleh Kepala Dinas Pendidikan Kalimantan Selatan (Dr. Ngadimun, MM). Penyelenggara UN Tingkat Provinsi diwakili oleh Ketua Penyelenggara UN Provinsi Maluku Utara (Fauji Koda, S.Ag., M.Pd) dan Bendahara UN Tingkat Provinsi diwakili oleh Bendahara Provinsi Bengkulu (Hindun). Contoh pakta integritas adalah sebagai berikut.

PAKTA INTEGRITAS
PENYELENGGARAAN UJIAN NASIONAL
TAHUN PELAJARAN 2012/2013

Dalam rangka penyelenggaraan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2012/2013, Saya Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. Sanggup meningkatkan kualitas, akseptabilitas, dan kredibilitas penyelenggaraan Ujian Nasional untuk peningkatan mutu pendidikan.
2. Sanggup untuk melaksanakan tugas dan menyukseskan penyelenggaraan Ujian Nasional tingkat provinsi.
3. Sanggup melaksanakan Ujian Nasional secara jujur.
4. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral dan sanksi administrasi sesuai dengan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 28 Februari 2013

Yang Menerima,
 Kepala Dinas Pendidikan,

Yang Membuat,
 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Ttd
 Fauji Koda,S.Ag., M.Pd

ttd
 Prof. Dr. Ir. Mohammad Nuh, DEA

Menyaksikan,
 Kepala Balitbang,

Ketua BSNP,

Ttd
 Prof. Dr. Ir. Khairil Anwar Notodiputro

Ttd
 Prof. Dr. Ir. M.Aman Wirakartakusumah,M.Sc

SMA dan MA

Jadwal Ujian Nasional

No	Hari dan Tanggal	Waktu	Mata Pelajaran			
			Program IPA	Program IPS	Program Bahasa	MA Program Keagamaan
1.	UN Senin, 15 April 2013	07.30 – 09.30	Bahasa Indonesia	Bahasa Indonesia	Bahasa Indonesia	Bahasa Indonesia
	UN Susulan Senin, 22 April 2013					
2.	UN Selasa, 16 April 2013	07.30 – 09.30	Fisika	Ekonomi	Bahasa Asing	Tafsir
	UN Susulan Selasa, 23 April 2013					
3.	UN Rabu, 17 April 2013	07.30 – 09.30	Matematika	Matematika	Matematika	Matematika
	UN Susulan Rabu, 24 April 2013					
4.	UN Kamis, 18 April 2013	07.30 – 09.30	Kimia	Sosiologi	Antropologi	Fikih
	UN Susulan Kamis, 25 April 2013					

SMK

No	Hari dan Tanggal	Waktu	Mata pelajaran
	UN: Senin, 15 April 2013	07.30 – 09.30	Bahasa Indonesia
	UN Susulan: Senin, 22 April 2013		
	UN: Selasa, 16 April 2013	07.30 – 09.30	Bahasa Inggris
	UN Susulan: Selasa, 23 April 2013		
	UN: Rabu, 17 April 2013	07.30 – 09.30	Matematika
	UN Susulan: Rabu, 24 April 2013		

SMALB

No	Hari dan Tanggal	Waktu	Mata pelajaran
	UN: Senin, 15 April 2013	07.30 – 09.30	Bahasa Indonesia
	UN Susulan: Senin, 22 April 2013		
	UN: Selasa, 16 April 2013	07.30 – 09.30	Bahasa Inggris
	UN Susulan: Selasa, 23 April 2013		
	UN: Rabu, 17 April 2013	07.30 – 09.30	Matematika
	UN Susulan: Rabu, 24 April 2013		

Paket C

No.	Program	Hari	Tanggal		Waktu	Mata Ujian
			Periode I	Periode II		
1.	Paket C IPS	Senin	15 April 2013	01 Juli 2013	13.00 – 15.00 15.30 – 17.30	Pendidikan Kewarganegaraan Bahasa Indonesia
		Selasa	16 April 2013	02 Juli 2013	13.00 – 15.00 15.30 – 17.30	Sosiologi Geografi
		Rabu	17 April 2013	03 Juli 2013	13.00 – 15.00 15.30 – 17.30	Ekonomi Bahasa Inggris
		Kamis	18 April 2013	04 Juli 2013	13.00 – 15.00	Matematika
2.	Paket C IPA	Senin	15 April 2013	01 Juli 2013	13.00 – 15.00 15.30 – 17.30	Pendidikan Kewarganegaraan Bahasa Indonesia
		Selasa	16 April 2013	02 Juli 2013	13.00 – 15.00 15.30 – 17.30	Biologi Kimia
		Rabu	17 April 2013	03 Juli 2013	13.00 – 15.00 15.30 – 17.30	Fisika Bahasa Inggris
		Kamis	18 April 2013	04 Juli 2013	13.00 – 15.00	Matematika
3.	Paket C Kejuruan	Senin	15 April 2013	01 Juli 2013	13.00 – 15.00 15.30 – 17.30	Pendidikan Kewarganegaraan Bahasa Indonesia
		Selasa	16 April 2013	02 Juli 2013	13.00 – 15.00 15.30 – 17.30	Matematika Bahasa Inggris

SMP, MTs, dan SMPLB

No	Hari dan Tanggal	Waktu	Mata pelajaran
	UN: Senin, 22 April 2013	07.30 – 09.30	Bahasa Indonesia
	UN Susulan: Senin, 29 April 2013		
	UN: Selasa, 23 April 2013	07.30 – 09.30	Bahasa Inggris
	UN Susulan: Selasa, 30 April 2013		
	UN: Rabu, 24 April 2013	07.30 – 09.30	Matematika
	UN Susulan: Rabu, 1 Mei 2013		
	UN: Kamis, 25 April 2013	07.30 – 09.30	Ilmu Pengetahuan Alam
	UN Susulan: Kamis, 2 Mei 2013		

Paket B/Wustha

No.	Hari	Tanggal		Waktu	Mata Ujian
		Periode I	Periode II		
1.	Senin	22 April 2013	01 Juli 2013	13.00 – 15.00 15.30 – 17.30	Pendidikan Kewarganegaraan Bahasa Indonesia
2.	Selasa	23 April 2013	02 Juli 2013	13.00 – 15.00 15.30 – 17.30	Ilmu Pengetahuan Sosial Matematika
3.	Rabu	24 April 2013	03 Juli 2013	13.00 – 15.00 15.30 – 17.30	Ilmu Pengetahuan Alam Bahasa Inggris

Paket A/Ula

No.	Hari	Tanggal		Waktu	Mata Ujian
		Periode I	Periode II		
1.	Senin	22 April 2013	01 Juli 2013	13.00 – 15.00 15.30 – 17.30	Pendidikan Kewarganegaraan Bahasa Indonesia
2.	Selasa	23 April 2013	02 Juli 2013	13.00 – 15.00 15.30 – 17.30	Ilmu Pengetahuan Sosial Ilmu Pengetahuan Alam
3.	Rabu	24 April 2013	03 Juli 2013	13.00 – 15.00	Matematika

Ketua dan Anggota BSNP

Mengucapkan

SELAMAT MENEMPUH UJIAN NASIONAL TAHUN PELAJARAN 2012/2013

SMA/MA, SMALB dan SMK: 15-18 April 2013
SMP/MTs dan SMPLB : 22-24 April 2013
SD/MI dan SDLB : 6-8 Mei 2013

**PERCAYA DIRI DAN KEJUJURAN
ADALAH KUNCI KESUKSESAN**

Ketua

Ttd

Prof. Dr. Ir. M. Aman Wirakartakusumah, M.Sc

MAHKAMAH KONSTITUSI BATALKAN RSBI

Pada tanggal 8 Januari 2013, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan Rintisan Sekolah Berstandar Internasional atau RSBI inkonstitusional atau bertentangan dengan Undang-Undang 1945. Keberadaan RSBI, menurut MK, telah mengabaikan tanggungjawab negara untuk menyediakan pendidikan bermutu bagi semua warga negara.

Ada tiga alasan MK membatalkan RSBI sebagaimana dimuat dalam harian Kompas

menikmati pendidikan di RSBI. Tentang penggunaan bahasa asing sebagai bahasa pengantar, MK menilai kondisi ini memimiliki potensi menghilangkan bahasa Indonesia sebagai jati diri bangsa.

Putusan tersebut ditetapkan atas uji materi terhadap Pasal 50 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berbunyi "Pemerintah dan/atau pemerintah daerah



Sumber: Solopos.com, diunduh 14 Maret 2013.

(9/1/2013). Pertama, MK tidak menafikan pentingnya bahasa Inggris, tetapi istilah internasional sangat berpotensi mengikis kebudayaan dan bahasa Indonesia. Kedua, lulusan pendidikan yang dihasilkan RSBI dan SBI adalah siswa berprestasi, tetapi tidak harus berlabel berstandar internasional. Ketiga, RSBI membuka peluang pembedaan perlakuan antara sekolah RSBI/SBI dan sekolah non-SBI.

MK menilai RSBI memimicu terjadinya diskriminasi pendidikan. Hanya orang-orang yang pinter dan kaya saja yang dapat

menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional".

Menanggapi putusan MK tersebut, Mohammad Nuh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengatakan bahwa Pemerintah menghargai putusan MK tentang pembatalan RSBI dan siap melaksanakan. "Pada prinsipnya kami menghormati putusan MK dan siap melaksanakan. Untuk itu, kami akan segera mempelajari detail keputusan MK ini", ucap

* Bambang Suryadi

Mohammad Nuh seraya menambahkan bahwa yang bersangkutan akan segera mempelajari putusan MK.

Sebagai dampak dari putusan MK ini, Mohammad Nuh, sebagaimana diberitakan oleh Kompas (9/1/2013) meminta kepada para guru, kepala sekolah, dan siswa untuk tetap bersemangat dalam proses belajar mengajar. "Masyarakat dan guru tidak perlu khawatir, jalan saja seperti biasa. Kegiatan di sekolah RSBI tidak serta merta distop. Nanti ada masa transisinya. Para guru tetap harus bersemangat untuk memberikan layanan pendidikan berkualitas", ucapan Nuh.

Sejak tahun 2007 sampai 2011 jumlah RSBI di seluruh Indonesia adalah 85.794 sekolah yang terdiri atas SD, SMP, SMA, dan SMK. Rinciannya adalah 239 SD, 356 SMP, 359 SMA, dan 351 SMK.

Selama ini ada tiga kategorisasi sekolah, yaitu Sekolah Standar Nasional (SNN), Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI), dan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI). Kriteria SNN adalah memiliki rata-rata nilai Ujian

Nasional 6,5; pembelajaran tidak menggunakan sistem shift (kelas pagi-sore); dan terakreditasi minimal B oleh BAN Sekolah/Madrasah.

Kriteria RSBI adalah memiliki akreditasi A dari BAN S/M, sudah memenuhi Standar SNN, pembelajaran IPA, Matematika, dan kejuruan dilakukan dalam dua bahasa (bilingual), memiliki nilai rata-rata UN 7,0, guru berpendidikan S-2 untuk SD minimal 10 persen, SMP minimal 20 persen, dan SMA/MK minimal 30 persen.

Kriteria SBI adalah SNP dan diperkaya dengan standar kualitas pendidikan negara maju. Terakreditasi A dari BAN S/M, pembelajaran IPA, Matematika dan kejuruan dilakukan dengan dua bahasa (bilingual), nilai rata-rata UN 8,0.

Gugatan terhadap RSBI diajukan ke MK oleh orang tua siswa RSBI, guru, dosen, aktivis pendidikan, dan lembaga swadaya masyarakat. Putusan MK ini memiliki implikasi pemberian jaminan untuk mendapatkan akses pendidikan berkualitas tanpa ada pembedaan bagi seluruh warga negara. ●

KEGIATAN BSNP TAHUN 2013

Pada tahun 2012 BSNP telah melakukan monitoring dan evaluasi implementasi standar nasional pendidikan untuk pendidikan dasar dan menengah. Ada delapan standar yang dipantau, yaitu standar proses, standar sarana dan prasarana, standar biaya, standar pengelolaan, standar penilaian, buku teks pelajaran dan pendidikan nonformal.

Sebagai tindak lanjut dari hasil pemantauan implementasi standar tersebut, BSNP akan melakukan penyempurnaan standar. "BSNP akan menyempurnakan standar berdasarkan temuan empiris di lapangan", ungkap M. Aman Wirakartakusumah dalam rapat pleno BSNP di Jakarta.

Sementara Edy Tri Baskoro menyebutkan pada tahun 2013 ada 9 (sembilan) kegiatan BSNP. "Dari sembilan kegiatan ini, tujuh kegiatan adalah penyempurnaan standar, satu kegiatan adalah penyusunan standar penetapan karya sastra Indonesia unggulan untuk dipelajari oleh peserta didik, dan satu kegiatan lagi adalah evaluasi Ujian Nasional", ucapan Edy Tri Baskoro.

Lebih lanjut Edy Tri Baskoro mengatakan bahwa penetapan karya sastra Indonesia merupakan amanat PP 19/2005 yang merupakan satu-satunya standar yang belum

dikembangkan oleh BSNP.

Sesuai dengan penjelasan atas PP 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 6 ayat (1) butir b, disebutkan bahwa muatan bahasa mencakup antara lain penanaman kemahiran berbahasa dan apresiasi terhadap karya sastra. Untuk menanamkan apresiasi terhadap karya sastra Indonesia, BSNP menetapkan karya-karya sastra Indonesia unggulan yang wajib dipelajari oleh peserta didik pada setiap jenjang pendidikan.

Untuk masing-masing kegiatan, BSNP telah menetapkan sepuluh langkah, yaitu (1) penyusunan desain kegiatan, (2) kajian hasil pemantauan dan evaluasi standar, (3) penyusunan draf penyempurnaan standar, (4) reviu draf penyempurnaan standar, (5) validasi penyempurnaan standar (dilaksanakan di daerah), (6) penyempurnaan draf standar berdasarkan validasi, (7) persiapan uji publik, (8) uji publik draf penyempurnaan standar (dilaksanakan di daerah), (9) finalisasi penyempurnaan standar, dan (10) penyusunan rekomendasi penyempurnaan standar. Sepuluh langkah kegiatan ini telah diputuskan dalam rapat pleno BSNP tanggal 10 Desember 2012.

Selain itu, pada tahun 2013 juga ada rotasi

Pejabat dan staf keuangan & sekretariat BSNP berpose bersama. Duduk, dari kiri ke kanan, Ning Karningsih, Hafidz Muksin, Neneng Tresnaningsih, Rosmalina. Berdiri, dari kiri ke kanan, Djuandi, Budiman, Juliano, Dani Ashari, Eko Haryanto, Irna Yulianti, Nurul Najmah, Nova Budiarti, Renny Wulansari, Sugi Wahyono, Hans Mangundap, Djadja Halimi, Ibar Warsita, dan Reman.



dan penyegaran pejabat dan staf di bagian keuangan BSNP. Neneng Tresnaningsih Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) BSNP digantikan oleh Hafidz Muksin dari Balitbang. Sementara staf keuangan BSNP Sugi Wahyono menempati posisi baru di Balitbang dan Nova Budianti menempati posisi baru di Puspendik.

Terimakasih kami sampaikan kepada

Ibu Neneng Tresnaningsih dan semua pihak yang telah membantu selama ini dalam melaksanakan tugas dan kegiatan BSNP. Kepada Pak Hafidz Muksin, kami ucapkan selamat bergabung dengan BSNP, semoga kehadiran Bapak membawa kemajuan bagi lembaga ini.

Ketua dan Anggota BSNP beserta seluruh staf sekretariat dan keuangan

mengucapkan terimakasih kepada

Ibu Neneng Tresnaningsih, M.Si (Pejabat Pembuat Komitmen BSNP 2006-2012)

Atas dedikasi, partisipasi, loyalitas, dan komitmen yang diberikan selama ini dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan BSNP.

Selamat mengemban tugas dan amanat di tempat kerja yang baru.
Semoga Allah memberikan pertolongan dan
kemudahan dalam segala hal. Amin.

Peserta rapat koordinasi penyelenggaraan UN tahun 2013 menyampaikan pertanyaan kepada nara sumber.



Tim ahli pemantauan dan evaluasi standar sarana dan prasarana sekolah dasar dan menengah berpose bersama setelah selesai kegiatan terakhir penyusunan laporan pemantauan dan evaluasi standar di kantor BSNP.

Dari kiri ke kanan, Khairil Anwar Notordiputro Kepala Balitbang, Musliar Kasim Wakil Menteri Bidang Pendidikan, dan Abdullah Alkaff Staf Ahli Menteri Pendidikan dan Kebudayaan memberikan penjelasan kepada anggota BSNP tentang persiapan implementasi Kurikulum 2013 di Jakarta.





Weinata Sairin Anggota BSNP (kanan) dan M. Aman Wirakartakusumah Ketua BSNP (kiri) menyampaikan berita tentang Kurikulum 2013 di media cetak.

Ketua dan Anggota BSNP memeriksa draf buku teks pelajaran dalam Rapat Kerja Review Buku Teks Pelajaran Sekolah Dasar Kelas I dan IV Tahun 2013. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bekerjasama dengan ACDP Indonesia (Education Sector Analytical and Capacity Development Partnership) pada tanggal 22-23 Februari 2013 di Jakarta



Ketua BSNP M. Aman Wirakartakusumah (berdiri tengah) dan Anggota BSNP Edy Tri Baskoro (berdiri kiri) berbincang-bincang dengan Fransisca reviewer buku teks pelajaran SD.



Para penulis dan reviewer sedang merevisi dan menelaah buku teks pelajaran SD yang akan dipakai dalam implementasi Kurikulum 2013. Ada dua jenis buku yang disiapkan, yaitu buku untuk murid dan buku untuk guru.

Kunjungi Website kami di:

<http://www.bsnp-indonesia.org>